



Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (PDRBHK) Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara (2006-2021)

The Influence of Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product at Constant Prices (GRDPHK) and Unemployment Rate on Poor Population in North Sumatra Province (2006-2021)

Uswatul Akmalia¹, Rina², Joko Suhariato³

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: uswatulakmalia3@gmail.com¹, rina20200407@gmail.com², djoko@unimed.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 19-03-2025

Revised : 21-03-2025

Accepted : 23-03-2025

Published: 25-03-2025

Abstract

Poverty is a major issue in economic development, especially in North Sumatra Province. This study analyzes the influence of the Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product at Constant Prices (GRDP), and the unemployment rate on the number of poor people in the 2006-2021 period using multiple linear regression (OLS) methods. The results show that only the unemployment rate has a positive and significant effect on the number of poor people, while HDI and GRDP do not have a significant impact. These findings indicate that unemployment has a greater impact on poverty than other factors. Therefore, poverty alleviation policies should focus on job creation and reducing unemployment.

Keyword: Poverty, Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product at Constant Prices (GRDP), Unemployment, North Sumatra.

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (PDRBHK), dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin pada periode 2006-2021 dengan metode regresi linier berganda (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tingkat pengangguran yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sementara IPM dan PDRBHK tidak berpengaruh secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengangguran lebih berdampak terhadap kemiskinan dibandingkan faktor lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

Kata Kunci: Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (PDRBHK).

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Menurut World Bank (2004), kemiskinan adalah kondisi kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well-being*) yang ditandai dengan rendahnya pendapatan, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tingkat

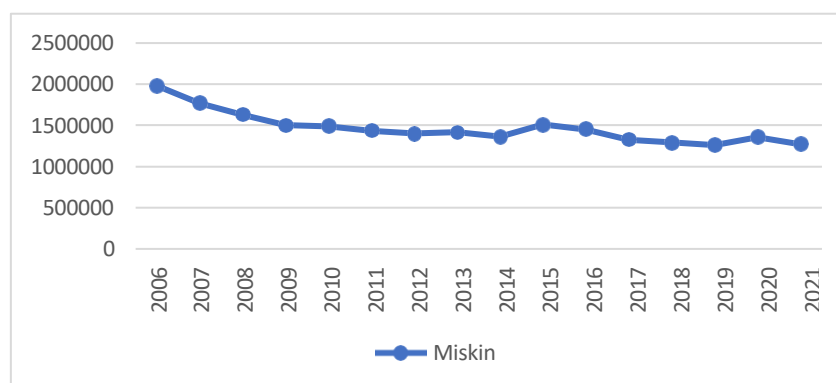


kesehatan dan pendidikan yang rendah, serta ketidakamanan sosial dan ekonomi.

Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat berbagai faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (PDRBHK), serta jumlah Pengangguran. IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan. Sementara itu, PDRBHK menggambarkan kapasitas ekonomi suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah serta membuka peluang lapangan kerja. Tingkat pengangguran juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh semakin tinggi angka pengangguran, semakin banyak penduduk yang tidak memiliki penghasilan tetap, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan dipandang sebagai suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. (Bappenas 2004). Tingkat kemiskinan sering kali digunakan sebagai indikator kesejahteraan sosial dalam suatu daerah atau negara. Menurut Sumutprov (Jumlah Penduduk Miskin di Sumut Turun dalam Tiga Tahun Terakhir), tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mencapai 8,15% dari total populasi Sumatera Utara.

Di Provinsi Sumatera Utara, angka kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan namun masih menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersaji, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 1.979.702 jiwa pada tahun 2006 menjadi 1.273.070 jiwa pada tahun 2021, atau turun sebesar 35,69 persen dalam kurun waktu 15 tahun. Penurunan jumlah penduduk miskin yang paling signifikan terjadi pada periode 2006-2010, dimana jumlah penduduk miskin turun dari 1.979.702 jiwa menjadi 1.490.000 jiwa, atau turun sebesar 24,74 persen. Hal ini bisa dilihat dari Gambar 1.1. berikut:

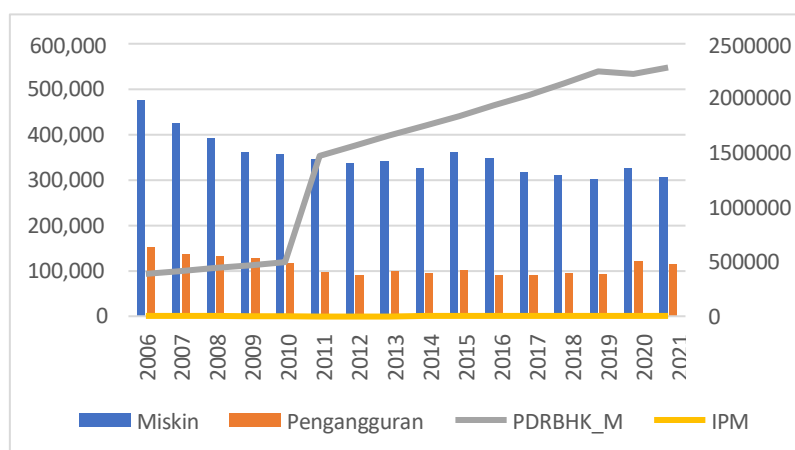


Gambar 1.1. Tingkat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara Tahun 2006-2021

Berdasarkan Gambar 1.1. di atas diketahui terdapat fluktuasi yang patut dicermati. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013, 2015, dan 2020. Kenaikan jumlah penduduk miskin terbesar terjadi pada tahun 2015 yakni sebanyak 1.508.140 jiwa dari sebelumnya 1.360.600 jiwa di tahun 2014, atau meningkat sebesar 10,84 persen. Kenaikan ini bertepatan dengan terjadinya perlambatan ekonomi global dan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2020 juga terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 1.356.700 jiwa dari sebelumnya 1.260.500 jiwa di tahun 2019, atau meningkat sebesar 7,63 persen. Kenaikan ini bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (PDRBHK), dan tingkat pengangguran.



Hal ini didukung oleh beberapa pendapat ahli, diantaranya Siregar (2008) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran. Selain itu, menurut Arsyad (2010), kemiskinan berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.



Gambar 1.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRBHK, Tingkat Pengangguran Dan Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara 2006-2021

Data menunjukkan adanya inkonsistensi antara teori dan fakta empiris di lapangan untuk ketiga variabel yang diteliti. Untuk variabel IPM (X1), terdapat beberapa fenomena yang bertentangan dengan teori. Pada tahun 2013, IPM Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 67,74 pada tahun 2012 menjadi 68,36, namun jumlah penduduk miskin justru mengalami kenaikan dari 1.400.400 jiwa menjadi 1.416.400 jiwa. Hal serupa terjadi pada tahun 2015, di mana IPM meningkat dari 68,87 pada tahun 2014 menjadi 69,51, tetapi jumlah penduduk miskin justru meningkat signifikan dari 1.360.600 jiwa menjadi 1.508.140 jiwa.

Fenomena menarik lainnya terjadi terkait perubahan metodologi perhitungan IPM pada tahun 2010. Terjadi penurunan nilai IPM yang cukup drastis dari 73,80 pada tahun 2009 menjadi 67,09 pada tahun 2010 sebagai dampak dari perubahan metodologi tersebut. Namun, menariknya, penurunan nilai IPM ini ternyata diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1.500.000 jiwa pada tahun 2009 menjadi 1.490.000 jiwa pada tahun 2010. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa penurunan IPM seharusnya diikuti dengan peningkatan kemiskinan.

Untuk variabel PDRBHK (X2), juga ditemukan inkonsistensi serupa. Pada tahun 2013, PDRBHK Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 375.920 miliar rupiah pada tahun 2012 menjadi 398.720 miliar rupiah, namun jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 1.400.400 jiwa menjadi 1.416.400 jiwa. Begitu pula pada tahun 2015, PDRBHK meningkat dari 419.570 miliar rupiah pada tahun 2014 menjadi 440.960 miliar rupiah, tetapi jumlah penduduk miskin justru meningkat signifikan dari 1.360.600 jiwa menjadi 1.508.140 jiwa.

Namun, terdapat pula data yang mendukung teori, seperti yang terjadi pada tahun 2011. Kenaikan PDRBHK yang sangat signifikan dari 118.718 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 353.150 miliar rupiah (meningkat sebesar 197,47%) diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1.490.000 jiwa menjadi 1.436.400 jiwa (turun sebesar 3,60%). Meskipun kenaikan PDRBHK tersebut kemungkinan disebabkan oleh perubahan tahun dasar perhitungan



PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010, namun data ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan PDRBHK dapat menurunkan kemiskinan.

Sementara untuk variabel Pengangguran (X3), sebagian besar data menunjukkan konsistensi dengan teori. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 379.980 jiwa pada tahun 2012 menjadi 412.200 jiwa, dan hal ini diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin dari 1.400.400 jiwa menjadi 1.416.400 jiwa. Begitu juga pada tahun 2015, tingkat pengangguran meningkat dari 390.710 jiwa pada tahun 2014 menjadi 428.794 jiwa, dan hal ini diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin dari 1.360.600 jiwa menjadi 1.508.140 jiwa.

Namun, terdapat kesenjangan pada tahun 2018, di mana tingkat pengangguran meningkat dari 377.288 jiwa pada tahun 2017 menjadi 396.027 jiwa, tetapi jumlah penduduk miskin justru menurun dari 1.326.600 jiwa menjadi 1.291.900 jiwa. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan pengangguran seharusnya diikuti dengan peningkatan kemiskinan.

LANDASAN TEORI

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Secara konseptual, terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. World Bank (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well-being*) yang ditandai dengan rendahnya pendapatan, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, serta ketidakamanan sosial dan ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2020).

Chambers (1995) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri (*poverty*), (2) ketidakberdayaan (*powerless*), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), (4) ketergantungan (*dependency*), dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (UNDP, 2015).

Menurut BPS (2021), IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Hubungan IPM dengan Kemiskinan

Menurut Amartya Sen (1981), kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakcukupan pendapatan, tetapi juga sebagai kegagalan kapabilitas dasar atau ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasar. Oleh karena itu, penguatan kapabilitas manusia melalui peningkatan indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang tercakup dalam IPM dapat menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan.



Todaro dan Smith (2015) berpendapat bahwa pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu untuk dimaksimalkan. Apabila faktor-faktor produksi dimaksimalkan maka pendapatan akan meningkat dan kemiskinan akan turun. Dengan demikian, terdapat hubungan negatif antara IPM dengan tingkat kemiskinan, di mana ketika IPM meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu (BPS, 2020). PDRB Harga Konstan (PDRBHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno (2015), PDRB merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan selama satu tahun tertentu. PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Hubungan PDRB dengan Kemiskinan

Teori Trickle Down Effect yang dikemukakan oleh Arthur Lewis (1954) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menetes ke bawah dan memberikan manfaat bagi masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Dengan demikian, peningkatan PDRB diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Kuncoro (2010) menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan tradisional menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Peningkatan pendapatan nasional atau PDRB secara signifikan menjadi kunci utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2015). Menurut BPS, pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran siklikal, dan pengangguran musiman (Mankiw, 2016).

Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan

Arsyad (2010) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara tingginya tingkat pengangguran dengan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part-time) selalu berada di antara kelompok masyarakat miskin.

Menurut teori Okun Law yang dikemukakan oleh Arthur Okun, tingkat pengangguran memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan (Mankiw, 2016). Hal ini disebabkan karena pengangguran menyebabkan hilangnya pendapatan dan menurunkan tingkat kemakmuran yang telah dicapai, sehingga dapat mengakibatkan seseorang atau rumah tangga jatuh ke bawah garis kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder berupa



data *time series* yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. dengan menggunakan data tahunan dari tahun 2006 sampai 2021.

Analisis yang digunakan adalah analisis ekonometrika dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Metode OLS memiliki kemampuan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, karena OLS memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)*. Model dimaksud diformulasikan ke dalam bentuk logaritma, sehingga model estimasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{LogMISKIN} = \beta_0 + \beta_1\text{IPM} + \beta_2\text{LogPDRBHK} + \beta_3\text{LogPENGANGGURAN} + e$$

Dimana:

MISKIN = Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PDRBHK = Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (Miliar Rupiah)

PENGANGGURAN = Jumlah Pengangguran (Jiwa)

ε = Stochastic Term Error Log

= Logaritma

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Indeks Pembangunan Manusia β_2

= Koefisien PDRB Harga Konstan

β_3 = Koefisien Jumlah Pengangguran

1. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghazali (2018) untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas menggunakan *Jarque Bera Test* dengan narasi hipotesis statistik sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat permasalahan uji normalitas data

H_a : terdapat permasalahan uji normalitas data

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Terima H_0 , jika prob. *Jarque Bera* > 0,05. Artinya tidak terdapat permasalahan uji normalitas pada model penelitian.
- 2) Tolak H_0 , jika prob. *Jarque Bera* < 0,05. Artinya terdapat permasalahan uji normalitas pada model penelitian.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk melihat apakah terdapat korelasi atau hubungan yang erat antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Cara mendeteksi Multikolinearitas adalah dengan nilai Centered VIF (*Variance Inflation Factor*) (Sarwono dan N.S, 2014). Adapun narasi hipotesis statistik uji multikolinearitas ini sebagai berikut:



Ho : Tidak terdapat permasalahan multikolinearitas data

Ha : Terdapat permasalahan multikolinearitas data

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Terima Ho, jika nilai $VIF < 10$. Artinya tidak terdapat permasalahan multikolinearitas pada model penelitian.
- 2) Tolak Ho, jika nilai $VIF > 10$. Artinya terdapat permasalahan multikolinearitas pada model penelitian.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Ghozali (2006). Uji autokorelasi dengan evIEWS menggunakan *Breusch-Godfrey LM Test*. Seperti uji heteroskedastisitas, pengambilan keputusan uji autokorelasi juga terfokus pada prob *obs r-square*. Adapun narasi hipotesis statistik untuk uji autokorelasi ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat permasalahan autokorelasi data

Ha : Terdapat permasalahan autokorelasi data

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Terima Ho, jika prob. *obs r square* $> 0,05$. Artinya tidak terdapat permasalahan autokorelasi pada model penelitian.
- 2) Tolak Ho, jika prob. *chi square* $< 0,05$. Artinya terdapat permasalahan autokorelasi pada model penelitian.

d. Uji Heteroskedastisitas

Masalah heteroskedastisitas ini muncul apabila residual dari model regresi yang kita amati memiliki varian yang tidak konstan dari satu observasi ke observasi lain (Hasan, 2002). Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Padahal salah satu asumsi penting dalam model OLS atau regresi sederhana adalah varian bersifat homoskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah dengan Uji *Breusch Pagan Godfrey*. Adapun narasi hipotesis statistik uji heteroskedastisitas ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas data

Ha : Terdapat permasalahan heteroskedastisitas data

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Terima Ho, jika prob. *obs r square* $> 0,05$. Artinya tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada model penelitian.
- 2) Tolak Ho, jika prob. *chi square* $< 0,05$. Artinya terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada model penelitian.

2. Uji Hipotesis

a. Uji T Statistik (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial. Uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun rumus uji t adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2017):



$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai uji t

r = Koefisien korelasi

r² = Koefisien

determinasi n = Jumlah sampel

H1 Ho: Tidak terdapat pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Ha: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

H2 Ho: Tidak terdapat pengaruh PDRBHK terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Ha: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan PDRBHK terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

H3 Ho: Tidak terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Ha: Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara.

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Terima Ho, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan atau prob. $> 0,05$ pada uji satu arah. Artinya tidak terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.
- 2) Tolak Ho, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan atau prob. $< 0,05$ pada uji satu arah. Artinya terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

Nilai t tabel dalam penelitian ini adalah $n = 16$; $df = n - k - 1 = 16 - 3 - 1 = 12$; pada taraf alpha 0,05; satu arah, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,782.

b). Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2018) Uji F disini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (*independent*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*). Adapun rumus uji F adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2017):

$$F_h = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

F_h = Nilai uji f

R² = Koefisien determinasi n
= Jumlah sampel

k = Jumlah variabel independen

H4 Ho: Tidak terdapat pengaruh IPM, PDRBHK dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Ha: Terdapat pengaruh IPM, PDRBHK dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:



- 1) Terima H_0 , jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan atau prob. $> 0,05$. Artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependen*.
- 2) Tolak H_0 , jika $F_{hitung} > t_{tabel}$ dan atau prob. $< 0,05$. Artinya secara simultan terdapat pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependen*.

Nilai F tabel dalam penelitian ini adalah $n = 21$; df_1 (pembilang) = $k = 3$; df_2 (penyebut) = $n - k - 1 = 21 - 3 - 1 = 17$; pada taraf α 0,05, maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3,20. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sumatera Utara adalah sebuah Provinsi Indonesia yang berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1° -- 4° lintang utara dan 98° -- 100° bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan provinsi Aceh, sebelah timur dengan negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 8 Kota dan 25 Kabupaten.

Luas daratan provinsi Sumatera Utara yaitu 71.680,68 km^2 , sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil di pulau Nias, pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik itu di bagian barat maupun di bagian timur pulau Sumatera. Penelitian ini akan berfokus pada data provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan dalam periode 2006 hingga 2021.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik regional Bruto Harga Konstan (PDRBHK), Jumlah Pengangguran, serta jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006 – 2021.

Perkembangan Variabel Penelitian

Tahun	IPM	PDRBHK_M	Pengangguran	Miskin
2006	72,5	93.347	632049	1979702
2007	72,78	99.792	571334	1770000
2008	73,29	106.172	554539	1630000
2009	73,8	111.559	532427	1500000
2010	67,09	118.718	491806	1490000
2011	67,34	353.150	402120	1436400
2012	67,74	375.920	379980	1400400
2013	68,36	398.720	412200	1416400
2014	68,87	419.570	390710	1360600
2015	69,51	440.960	428794	1508140
2016	70	463.770	371680	1452600
2017	70,57	487.530	377288	1326600
2018	71,18	512.770	396027	1291900
2019	71,74	539.510	382438	1260500



2020	71,77	533.750	507805	1356700
2021	72	547.650	475156	1273070

Tabel 4.1. Data Ekonomi Sumut Tahun 2006-2021

Perkembangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Dari tahun 2006 hingga 2009, IPM meningkat secara bertahap dari 72,50 menjadi 73,80. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2010 menjadi 67,09, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan metodologi perhitungan. Setelah tahun 2010, IPM kembali menunjukkan tren positif dengan peningkatan konsisten setiap tahun hingga mencapai 72,00 pada tahun 2021.

PDRBHK (Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan) menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan selama periode penelitian. Nilai PDRBHK meningkat dari 93.347 pada tahun 2006 menjadi 547.650 pada tahun 2021. Peningkatan paling dramatis terjadi antara tahun 2010 ke 2011, di mana nilai PDRBHK melonjak dari 118.718 menjadi 353.150. Lonjakan drastis ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan metode perhitungan atau rebasing. Pertumbuhan PDRBHK cenderung konsisten setiap tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dari 539.510 menjadi 533.750, kemungkinan sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

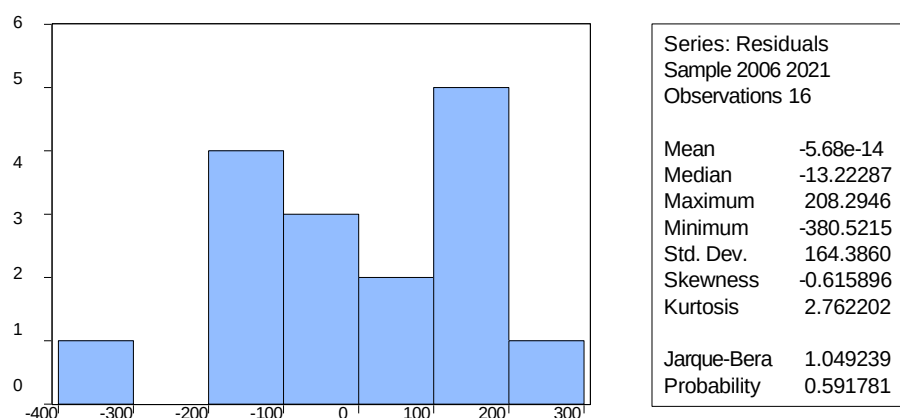
Jumlah pengangguran secara umum mengalami tren penurunan dalam periode penelitian. Pada tahun 2006, jumlah pengangguran mencapai 632.049 orang, kemudian terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2016 sebanyak 371.680 orang. Meskipun terjadi fluktuasi kecil pada beberapa tahun, tren penurunan ini relatif konsisten. Namun, terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2020 menjadi 507.805 orang, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, angka pengangguran kembali menurun menjadi 475.156 orang, menunjukkan awal pemulihan pasca-pandemi.

Tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan selama periode penelitian. Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 1.979.702 orang. Angka ini terus menurun secara konsisten hingga mencapai 1.260.500 orang pada tahun 2019. Namun, seperti halnya dengan variabel pengangguran, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 1.356.700 orang pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 1.273.070 orang, menandakan adanya pemulihan ekonomi.

Hasil Penelitian

Hasil Uji Asumsi Penelitian

a. Uji Normalitas


Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Penelitian



Berdasarkan hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa nilai prob. Jarque-Bera sebesar $0,5917 > 0,05$, maka H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran normalitas data dalam model penelitian ini.

b. Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.859060	Prob. F(2,10)	0.4526
Obs*R-squared	2.345932	Prob. Chi-Square(2)	0.3094

Tabel 4.3. Hasil Perhitungan Uji Autokorelasi Data Penelitian

Berdasarkan Uji Autokolerasi. di atas diketahui bahwa nilai *Prob. Chi Square* sebesar $0,3094 > 0,05$, maka H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran autokorelasi data dalam model penelitian ini.

c. Uji Multikolinearity

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.29E+08	61210.69	NA
LOG(PDRBHK)	19240.71	296.9205	4.351362
LOG(PENGANGGURAN)	231857.2	18612.60	3.098718
LOG(KEMISKINAN)	537262.7	51251.09	3.527239

Tabel 4.4. Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas Data Penelitian

Berdasarkan Uji Multikolinearity. di atas diketahui bahwa nilai VIF seluruh variabel < 10 , maka H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran multikolinearitas data dalam model penelitian ini

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	3.561509	Prob. F(3,12)	0.0474
Obs*R-squared	7.536081	Prob. Chi-Square(3)	0.0566
Scaled explained SS	3.735027	Prob. Chi-Square(3)	0.2915

Tabel 4.5. Hasil Perhitungan Uji Heteroskedastisitas Data Penelitian

Berdasarkan Uji Heteroskedastisitas. di atas diketahui bahwa nilai *Prob. Chi Square* dari Obs*R-squared sebesar $0,0566 > 0,05$, maka H_0 diterima artinya tidak terjadi pelanggaran heteroskedastisitas data dalam model penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya dilakukan tahap pengujian hipotesis model penelitian dengan hasil perhitungan sebagai berikut:



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
c	-495.4361	732.9820	-0.675919	0.5119
IPM	-3012.428	12209.64	-0.246725	0.8093
LOG(PDRBHK)	70.38107	138.7109	0.507394	0.6211
LOG(PENGANGGURAN)	1245.388	481.5155	2.586392	0.0238
R-squared	0.432454	Mean dependent var		7053.375
Adjusted R-squared	0.290567	S.D. dependent var		218.2048
S.E. of regression	183.7891	Akaike info criterion		13.47777
Sum squared resid	405341.3	Schwarz criterion		13.67092
Log likelihood	-103.8222	Hannan-Quinn criter.		13.48766
F-statistic	3.047885	Durbin-Watson stat		1.367697
Prob(F-statistic)	0.070081			

Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Uji Hipotesis Data Penelitian

Interpretasi Model Analisis Regresi Penelitian

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diketahui persamaan regresi model penelitian yang terbentuk sebagai berikut:

$$\text{LOG(MISKIN)} = -495.4361 - 3012.428(\text{IPM}) + 70.38107\text{LOG(PDRBHK)} - 495.4361\text{LOG(PENGANGGURAN)} + e$$

Dimana:

MISKIN = Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (Poin)

PDRBHK = Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (Miliar Rupiah)

PENGANGGURAN = Jumlah Pengangguran (Jiwa)

ε = Stochastic Term Error

LOG = Logaritma Natural

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien IPM

β_2 = Koefisien PDRBHK

β_3 = Koefisien Pengangguran

Berikut adalah interpretasi persamaan regresi di atas:

a. Variabel secara menyeluruh

Diperoleh nilai koefisien konstanta sebesar -495,4361 artinya bahwa jika variabel bebas yaitu IPM, PDRBHK, dan jumlah pengangguran dianggap konstan, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar antilog dari -495,4361 atau sekitar 495,4361% jiwa (angka ini bersifat teoritis karena merupakan nilai konstanta).

b. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Diperoleh nilai koefisien regresi variabel bebas IPM sebesar -3012,428. Artinya bahwa apabila nilai IPM naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara akan mengalami penurunan sebesar 3012,428% dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap. Koefisien IPM bernilai negatif mengartikan bahwa terdapat hubungan negatif IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Semakin tinggi nilai IPM, maka jumlah penduduk miskin akan semakin menurun.



c. Variabel Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (PDRBHK)

Diperoleh nilai koefisien regresi variabel bebas PDRBHK sebesar 70,38107. Artinya bahwa apabila nilai PDRBHK naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara akan mengalami penurunan sebesar 70,38107% dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap. Koefisien PDRBHK bernilai positif mengartikan bahwa terdapat hubungan positif PDRBHK terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Semakin tinggi nilai PDRBHK, maka jumlah penduduk miskin akan semakin menurun.

d. Variabel Jumlah Pengangguran

Diperoleh nilai koefisien regresi variabel bebas jumlah pengangguran sebesar 1245,388. Artinya bahwa apabila jumlah pengangguran naik sebesar 1 persen, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara akan mengalami peningkatan sebesar 1245,388% dengan asumsi nilai variabel lainnya tetap. Koefisien jumlah pengangguran bernilai positif mengartikan bahwa terdapat hubungan positif jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Semakin tinggi jumlah pengangguran, maka jumlah penduduk miskin juga akan meningkat.

Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Uji Hipotesis Parsial

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa:

- Variabel IPM memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-0.2467 < t_{tabel (0.05;3;17)}$ sebesar 1,739 dengan nilai probabilitas sebesar $0.8093 > 0.05$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh negatif dan signifikan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.
- Variabel PDRBHK memiliki nilai t_{hitung} sebesar $0.5073 < t_{tabel (0.05;3;17)}$ sebesar 1,739 dengan nilai probabilitas sebesar $0.6211 > 0.05$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh PDRBHK terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.
- Variabel jumlah pengangguran memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2.586 > t_{tabel (0.05;3;17)}$ sebesar 1,739 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0238 < 0.05$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

2. Uji Hipotesis Simultan

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar $3.047885 > t_{tabel (0.05;3;17)}$ sebesar 3,20 dengan nilai probabilitas sebesar $0.070081 > 0.05$, maka H_0 diterima artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan IPM, PDRBHK, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar $18.0416 > t_{tabel (0.05;3;17)}$ sebesar 3,20 dengan nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan investasi sektor industri, upah minum regional dan jumlah industri besar sedang terhadap penyerapan tenaga kerja industri besar sedang di Provinsi Sumatera Utara.

3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa nilai R -Square sebesar 0.432454. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu IPM, PDRBHK, dan jumlah pengangguran memberikan kontribusi sebesar 43,24% terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, sisanya 56,76%



Pembahasan Penelitian

Indeks pembangunan manusia (IPM) Terhadap Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai t_{hitung} sebesar $-0.2467 < t_{tabel (0.05;17)}$ sebesar 1,739 dengan nilai probabilitas sebesar $0.8093 > 0.05$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis yang mengkaitkan IPM dengan jumlah penduduk miskin tidak teruji kebenarannya.

Hal ini menolak teori pendukung sebelumnya, Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang umumnya menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian terbukti IPM yang tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat pengurangan kemiskinan meskipun terjadi peningkatan IPM. Pertama, peningkatan komponen IPM seperti pendidikan dan kesehatan mungkin belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan, sehingga masyarakat yang telah memiliki pendidikan lebih baik belum dapat mengakses pekerjaan dengan penghasilan yang mencukupi. Kedua, terdapat kemungkinan bahwa manfaat dari peningkatan IPM belum terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan secara keseluruhan. Ketiga, adanya jeda waktu (time lag) yang cukup panjang antara peningkatan IPM dengan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga efeknya tidak terlihat dalam data tahunan. Oleh karena itu, meskipun IPM meningkat, dampaknya terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tetap terbatas dan tidak signifikan.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRBHK) Terhadap Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara

Variabel PDRBHK memiliki nilai t_{hitung} sebesar $0.5073 < t_{tabel (0.05;17)}$ sebesar 1,739 dengan nilai probabilitas sebesar $0.6211 > 0.05$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh PDRBHK terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis yang mengkaitkan PDRBHK dengan jumlah penduduk miskin tidak teruji kebenarannya.

Hal ini menolak teori pendukung sebelumnya, dimana secara umum teori ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan PDRBHK seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak bersifat inklusif. Berdasarkan hasil penelitian terbukti PDRBHK yang tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat pengurangan kemiskinan meskipun terjadi peningkatan PDRBHK. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang terjadi kemungkinan tidak bersifat inklusif, dimana manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin. Kedua, pertumbuhan ekonomi mungkin lebih banyak didorong oleh sektor-sektor yang padat modal dan teknologi tinggi, yang tidak banyak menyerap tenaga kerja dari kelompok berpendapatan rendah. Ketiga, fenomena pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja (jobless growth) mungkin terjadi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti



dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, meskipun PDRBHK meningkat, dampaknya terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara tetap terbatas dan tidak signifikan.

Pengaruh pengangguran Terhadap Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara

Variabel jumlah pengangguran memiliki nilai t_{hitung} sebesar $2,586 > t_{tabel} (0,05;17)$ sebesar 1,739 dengan nilai probabilitas sebesar $0,0238 < 0,05$, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis yang mengkaitkan tingkat pengangguran dengan jumlah penduduk miskin teruji kebenarannya.

Hal ini mendukung teori pendukung sebelumnya, Siregar (2008) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan pengangguran. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian terbukti pengangguran yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pengangguran secara langsung berdampak pada hilangnya pendapatan rumah tangga, yang mengurangi daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan. Kedua, pengangguran yang tinggi menciptakan tekanan pada pasar tenaga kerja, yang dapat menurunkan tingkat upah secara keseluruhan, termasuk bagi mereka yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah. Ketiga, pengangguran berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang membuat reintegrasi ke pasar kerja semakin sulit, sehingga memperpanjang periode kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin, dengan koefisien pengaruh yang cukup besar yaitu 1245,388.

Pengaruh IPM, PDRBHK, dan jumlah pengangguran Terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam dokumen, secara simultan ketiga variabel independen (IPM, PDRBHK, dan jumlah pengangguran) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 3,047885 yang lebih kecil dari $t_{tabel} (0,05;3;17)$ sebesar 3,20, dengan nilai probabilitas 0,070081 yang lebih besar dari 0,05.

Meskipun tidak berpengaruh secara simultan, model penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 43,24% variasi dalam jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai R-Square sebesar 0,432454. Sisanya sebesar 56,76% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Secara individual, hasil penelitian menunjukkan:

1. IPM (Indeks Pembangunan Manusia): Tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan nilai koefisien -3012,428 (menunjukkan hubungan negatif). PDRBHK (Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan): Tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan nilai koefisien 70,38107 (menunjukkan hubungan positif, yang bertentangan dengan teori ekonomi umum).
2. Jumlah Pengangguran: Berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, dengan nilai koefisien 1245,388. Artinya, peningkatan pengangguran sebesar 1% akan



meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1245,388%.

Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks Provinsi Sumatera Utara selama periode 2006-2021, dari ketiga variabel yang diteliti, hanya pengangguran yang menjadi faktor signifikan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebaiknya lebih difokuskan pada upaya penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, ketimbang hanya mengandalkan peningkatan IPM atau pertumbuhan ekonomi (PDRBHK) semata.

Ketidaksignifikanan model secara simultan juga menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel-variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, seperti tingkat inflasi, distribusi pendapatan, akses terhadap layanan publik, atau faktor-faktor struktural lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (PDRBHK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara, sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, peningkatan pengangguran meningkatkan kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia belum efektif dalam menguranginya. Oleh karena itu, fokus utama kebijakan pengentasan kemiskinan sebaiknya diarahkan pada pengurangan tingkat pengangguran.

SARAN

1. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebaiknya lebih memprioritaskan program pengurangan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, dan mendukung kewirausahaan. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.
2. Meskipun IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dalam jangka pendek, pemerintah tetap perlu melanjutkan investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan penekanan pada pemerataan aksesnya bagi kelompok miskin, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Untuk pertumbuhan ekonomi (PDRBHK), perlu diarahkan menjadi lebih inklusif dengan melibatkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dari kelompok berpendapatan rendah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Badan Pusat Statistik. (2020). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2004). *Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Environment and Urbanization*, 7(1), 173-204.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Lewis, A. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. The Manchester School, 22(2), 139-191.

Mankiw, N. G. (2016). *Principles of Economics* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.

Sarwono, J., & Herlina, N.S. (2014). *SPSS 22: Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sen, A. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Oxford University Press.

Siregar, H. (2008). Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 20-30.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson.

UNDP. (2015). *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programme.

World Bank. (2004). *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*. Washington, DC: World Bank.